



LAPORAN TAHUNAN PIK PERIODE 2022

PUSAT INFOMASI DAN KOMUNIKASI



Pusat Informasi & Komunikasi

Sub Bagian Humas & Tata Usaha Kepala Perwakilan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan (Kalan) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur adalah menerima dan memberikan layanan informasi terhadap permintaan informasi yang masuk. Permintaan informasi yang masuk dari masyarakat merupakan bentuk apresiasi masyarakat terhadap keberadaan BPK. Opini publik pun dapat terjadi dari hal tersebut, bagaimana BPK menangani dan melayani permintaan informasi akan dinilai oleh pihak-pihak di luar BPK.

Permintaan informasi dari masyarakat kepada BPK mengindikasikan bahwa BPK menjadi tumpuan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabilitas dan transparan yang bersih, bebas dari KKN. Permintaan informasi ini bisa disampaikan secara langsung, email/surat maupun melalui website. Isi dari pada permintaan informasi masyarakat ini bermacam-macam, dimana mayoritas merupakan permintaan informasi terkait hasil pemeriksaan BPK yang menyangkut pengelolaan keuangan negara/daerah.

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi tentang segala bentuk informasi publik yang diminta oleh masyarakat melalui saluran permintaan informasi, dibuatlah laporan secara berkala yang memuat informasi tersebut. Hasil laporan ini dapat menjadi masukan dan informasi bagi siapa saja yang berkepentingan.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan penyajian berita aktual selama periode Tahun 2022 berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara/daerah.

Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengetahui kebutuhan informasi dan harapan masyarakat akan keberadaan BPK dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga pemeriksa yang transparan dan akuntabel.

B. HASIL KEGIATAN

Permintaan informasi ataupun komplain yang berasal dari publik internal maupun eksternal BPK dapat disalurkan melalui beberapa saluran informasi yaitu website, surat/email/telepon, ataupun datang langsung ke Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur) yang beralamat di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Jalan M. Yamin No.19 Samarinda.

**RESUME ANALISIS PERMINTAAN INFORMASI
DI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERIODE TAHUN 2022**

No.	KLASIFIKASI		URAIAN
1.	Pelayanan Informasi Publik		
	Pemintaan Informasi	:	52
	Pengaduan Masyarakat	:	5
	Komplain atas Informasi	:	-
2.	Saluran Permintaan Informasi, Pengaduan Masyarakat, dan Komplain atas Informasi		Jumlah : 57
	i) Website	:	45
	ii) Surat/Email/Telepon	:	11
	iii) Langsung	:	1
3.	Jenis Permintaan Informasi		
	a) Berkala	:	49
	b) Serta Merta	:	-
	c) Setiap Saat	:	-
	d) Dikecualikan	:	-
	e) Informasi lain-lain	:	3
4.	Pengaduan Masyarakat		
	Pemeriksaan		
	a) Permohonan Pemeriksaan	:	1
	b) Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	:	2
	c) Laporan Hasil Pemeriksaan	:	-
	Non Pemeriksaan		
	a) Kepegawaian/SDM	:	-
	b) Informasi BPK yang dipublikasikan	:	-
	c) Lain-lain	:	2
	d) Sampah (<i>Trash</i>)	:	-
5.	Komplain atas Informasi	:	-

C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menyadari pentingnya keterbukaan informasi bagi publik dan konsekuensi yang ditimbulkan jika tidak melaksanakannya. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK,

mengatur mengenai pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan BPK serta Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) sebagai sarana penerimaan permintaan informasi maupun pengaduan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal No.272/K/X-XIII.2/6/2015, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas teknis PPID BPK dilakukan oleh PIK sebagai unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Pelaksanaan pelayanan informasi publik yang mencakup fungsi PPID dan PIK pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan oleh Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan.

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur berupaya untuk memenuhi permintaan kebutuhan data dengan memberikan *softcopy* terlebih dahulu dan tidak dipungut biaya. Apabila diperlukan *hardcopy* dokumen dalam jumlah besar, maka biaya penggandaan dibebankan pada pemohon informasi. Dalam hal ini, anggaran untuk pelayanan informasi publik BPK dibebankan pada anggaran subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan.

Untuk mendukung proses pengelolaan informasi publik, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki berbagai formular yang digunakan dalam kegiatan pelayanan informasi publik antara lain:

1. Formulir Permintaan Informasi Publik;
2. Formulir Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik;
3. Formulir Pengaduan Masyarakat; dan
4. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.

D. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama periode Tahun 2022, jumlah pelayanan informasi publik di BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, baik yang diterima melalui website, e-mail, surat, Fax, maupun datang langsung ke PIK BPK Perwakilan Kalimantan Timur ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Pelayanan Informasi Publik BPK

No	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah
1	Permintaan Informasi	52
2	Pengaduan Masyarakat	5
3	Keberatan atas Informasi	-
	Total	57

1. PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI

a. Saluran Permintaan Informasi dan Komplain Atas Informasi

Permintaan informasi ataupun komplain yang berasal dari publik internal maupun eksternal BPK dapat disalurkan melalui beberapa saluran informasi yakni website,

surat/e-mail/telepon, ataupun datang langsung ke Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur) yang beralamat di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Jalan M. Yamin No.19 Samarinda.

Selama periode Tahun 2022, analisis kuantitatif pelayanan permintaan informasi dan komplain atas informasi di BPK yang masuk melalui saluran website, surat/e-mail/telepon, maupun datang langsung adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Saluran Permintaan Informasi

No.	Saluran	Jumlah	Persentase
1	Website	44	84,62%
2	Surat/Email/Telepon	7	13,46%
3	Langsung	1	1,92%
	JUMLAH	52	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama periode Tahun 2022, permintaan informasi yang masuk melalui website/e-ppid sebanyak 44 (empat puluh empat) permintaan, melalui surat/email/telepon sebanyak tujuh permintaan dan saluran datang langsung sebanyak satu permintaan.

b. Permintaan Informasi Berdasarkan Jenis Informasi

Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permintaan informasi yang masuk ke BPK diklasifikasikan berdasarkan jenis informasi yaitu informasi berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat, informasi yang dikecualikan, dan informasi lain-lain diluar jenis informasi yang ada. Pada Tahun 2022, analisis kuantitatif jenis permintaan informasi yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Permintaan Informasi Berdasarkan Jenis Informasi

No.	Saluran	Jumlah	Persentase
1	Berkala	49	94,23%
2	Serta Merta	0	0%
3	Setiap Saat	0	0%
4	Dikecualikan	0	0%
5	Informasi lain-lain	3	5,77%
	JUMLAH	52	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama periode Tahun 2022, permintaan informasi yang masuk seluruhnya pada jenis informasi berkala adalah sebanyak 49 permintaan dan informasi lain-lain sebanyak tiga permintaan sedangkan informasi serta merta, setiap saat maupun dikecualikan tidak ada.

c. Topik Permintaan Informasi

Permintaan informasi yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dikategorikan ke dalam topik permintaan informasi yaitu permohonan pemeriksaan, informasi permasalahan penyimpangan keuangan negara/daerah, laporan hasil pemeriksaan, kepegawaian/SDM, informasi BPK yang dipublikasikan, dan lain-lain. Pada Tahun 2022, sebanyak 52 permintaan informasi yang masuk yang dikategorikan sebagai berikut.

Tabel 4. Topik Permintaan Informasi

No.	Topik	Jumlah	Persentase
1	Permohonan Pemeriksaan	0	0%
2	Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	0	0%
3	Laporan Hasil Pemeriksaan	49	94,23%
4	Kepegawaian/ SDM	0	0%
5	Informasi BPK Yang Dipublikasikan	0	0%
6	Lain-lain	3	5,77%
7	Sampah (<i>Trash</i>)	0	0%
	JUMLAH	52	100%

Permintaan informasi yang masuk melalui website, surat/email pada Tahun 2022 merupakan permintaan informasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan sebanyak 49 permintaan dan lain-lain sebanyak tiga permintaan.

d. Tanggapan Terhadap Permintaan Informasi

Seluruh permintaan informasi yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur akan ditanggapi dengan pemenuhan informasi yang diminta oleh si pemohon informasi dengan syarat informasi yang diminta merupakan informasi yang tersedia di BPK dan bukan informasi yang dikecualikan sesuai dengan Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan BPK RI No.3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan. Tahun 2022, analisis kuantitatif atas tanggapan terhadap pelayanan

permintaan informasi di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Tanggapan Terhadap Permintaan Informasi

No	Topik	Jumlah	Dipenuhi	Tidak/Belum Dipenuhi/Dalam Proses	% Dipenuhi	Ket
	Pemeriksaan					
1	Permohonan Pemeriksaan	-	-	-	-	
2	Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	-	-	-	-	
3	Laporan Hasil Pemeriksaan	49	46	3	93,88%	
	Non Pemeriksaan					
4	Kepegawaian/SDM	-	-	-	-	
5	Informasi BPK yang dipublikasikan	-	-	-	-	
6	Lain-lain	3	3	-	-	
7	Sampah (<i>Trash</i>)	-	-	-	-	
	JUMLAH	52	49	3	93,88%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa permintaan informasi yang masuk melalui website, surat/email/telepon pada Tahun 2022 adalah permintaan informasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan. Pada tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) permintaan informasi yang tidak dapat dipenuhi karena persyaratan permintaan informasi tidak dilengkapi oleh pemohon.

e. Tindak Lanjut Permintaan Informasi

Permintaan informasi yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur akan ditanggapi dengan tindak lanjut. Pada Tahun 2022, analisis kuantitatif atas tindak lanjut terhadap pelayanan permintaan informasi di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Tindak Lanjut Permintaan Informasi

No	Tgl/ Bln	Saluran	Isi Permintaan Informasi	Status	Tindak Lanjut
1.	10 Januari 2022	Website PPID	LHP TA 2020 pada: 1. Kota Balikpapan 2. Kota Bontang 3. Kabupaten Mahakam Ulu	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
2.	12 Januari 2022	Website PPID	LHP TA 2011-2020 pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
3.	25 Januari 2022	Website PPID	LHP TA 2011-2020 pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>

4.	2 Februari 2022	Website PPID	LHP TA 2016-2020 pada Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kota Samarinda	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
5.	8 Februari 2022	Website PPID	LHP TA 2019-2020 pada: 1. Kota Balikpapan 2. Kabupaten Kutai Kartanegara	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
6.	1 Maret 2022	Website PPID	LHP TA 2019 dan 2020 Kabupaten Penajam Paser Utara	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
7.	2 Maret 2022	Website PPID	LHP TA 2020 pada: 1. Kota Balikpapan 2. Kota Samarinda 3. Kabupaten Kutai Kartanegara 4. Kabupaten Kutai Timur 5. Kabupaten Kutai Barat 6. Kabupaten Berau 7. Kabupaten Mahakam Ulu 8. Kabupaten Paser	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
8.	2 Maret 2022	Website PPID	LHP TA 2001-2010 pada: 1. Kota Samarinda 2. Kota Balikpapan 3. Kota Bontang	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
9.	23 Maret 2022	Website PPID	LHP TA 2011 dan 2020 Provinsi Kalimantan Timur TA 2011 dan 2020	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
10.	15 April 2022	Website PPID	LHP TA 2015 pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
11.	18 Mei 2022	Website PPID	LHP TA 2022 pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
12.	28 Mei 2022	Website PPID	LHP TA 2022 pada: 1. Provinsi Kalimantan Timur 2. Kota Samarinda 3. Kota Balikpapan 4. Kota Bontang 5. Kabupaten Kutai Kartanegara 6. Kabupaten Kutai Timur 7. Kabupaten Paser 8. Penajam Paser Utara	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
13.	28 Mei 2022	Website PPID	LHP Keuangan dan Kinerja	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
14.	28 Mei 2022	Website PPID	LHP TA 2022 pada Kabupaten Kutai Kartanegara	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
15.	2 Juni 2022	Website PPID	LHP TA 2020 dan 2022 pada Kota Bontang	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
16.	2 Juni 2022	Website PPID	LHP TA 2020: 1. Provinsi Kalimantan Timur 2. Kota Samarinda 3. Kabupaten Kutai Kartanegara	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
17.	6 Juni 2022	Website PPID	LHP TA 2016-2020 pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
18.	6 Juni 2022	Website PPID	LHP TA 2020 dan 2021 pada Kota Bontang	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
19.	8 Juni 2022	Website PPID	LHP TA 2021 pada: 1. Kota Bontang 2. Kabupaten Kutai Barat 3. Kabupaten Kutai Timur 4. Kabupaten Paser	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
20.	9 Juni 2022	Website PPID	LHP TA 2020 pada Kabupaten Kutai Kartanegara	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
21.	13 Juni 2022	Website PPID	LHP TA 2021 pada Kabupaten Berau	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>

22.	14 Juni 2022	Surat	LHP TA 2021 pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur (BPKP)	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
23.	14 Juni 2022	Surat	LHP TA 2021 pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
24.	14 Juni 2022	Website PPID	LHP TA 2021 pada Kabupaten Kutai Barat	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
25.	16 Juni 2022	Website PPID	LHP TA 2021 pada: 1. Kabupaten Mahakam Ulu 2. Kabupaten Kutai Barat	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
26.	16 Juni 2022	Surat	Bantuan Pengambilan Data berupa Kuesioner Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Mulawarman	Selesai	Pemohonan penyebaran Kuesioner telah disetujui dan difasilitasi
27.	17 Juni 2022	Website PPID	LHP TA 2020 pada Kota Samarinda	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
28.	21 Juni 2022	Surat	LHP TA 2021 pada Pemeriksaan BTT di Provinsi Kalimantan Timur	Selesai	Mengarahkan pemohon untuk berkoordinasi kepada Inspektorat
29.	22 Juni 2022	Website PPID	LHP TA 2021 pada Kota Bontang	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
30.	24 Juni 2022	Surat	Bantuan Pengambilan Data berupa Kuesioner Tugas Akhir Mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda	Selesai	Pemohonan penyebaran Kuesioner telah disetujui dan difasilitasi
31.	29 Juni 2022	Surat	LHP TA 2021 pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur	Tidak dapat ditindaklanjuti	Informasi tidak diberikan karena tujuan penggunaan LHP tidak dapat dijelaskan oleh pemohon
32.	29 Juni 2022	Website PPID	LHP TA 2022 pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
33.	30 Juni 2022	Website PPID	LHP TA 2021: 1. Kabupaten Berau 2. Kabupaten Penajam Paser Utara	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
34.	1 Juli 2022	Website PPID	LHP TA 2021; 1. Kabupaten Berau 2. Kabupaten Penajam Paser Utara	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
35.	2 Juli 2022	Website PPID	LHP TA 2021: 1. Kabupaten Kutai Timur 2. Kabupaten Kutai Barat	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
36.	2 Juli 2022	Website PPID	LHP TA 2021: 1. Provinsi Kalimantan Timur 2. Kabupaten Penajam Paser Utara	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
37.	3 Juli 2022	Website PPID	LHP TA 2021: 1. Provinsi Kalimantan Timur 2. Kabupaten Kutai Kartanegara	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
38.	6 Juli 2022	Website PPID	LHP TA 2021 Kabupaten Berau	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
39.	7 Juli 2022	Website PPID	LHP TA 2019, 2020, dan 2021 Provinsi Kalimantan Timur	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
40.	9 Agustus 2022	Website PPID	LHP TA 2021 pada Kabupaten Kutai Kartanegara (Buku I)	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
41.	22 Agustus 2022	Website PPID	LHP TA 2021 pada Kabupaten Kutai Timur	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
42.	29 Agustus 2022	Website PPID	LHP TA 2021 pada Kabupaten Kutai Kartanegara (Buku II)	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
43.	6 September 2022	Surat	LHP TA 2021 pada Kabupaten Kutai Timur	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>softcopy</i>

44.	26 September 2022	Website PPID	LHP TA 2020 pada Kabupaten Berau	Tidak dapat ditindaklanjuti	Pemohon tidak melengkapi persyaratan Permintaan Informasi
45.	23 September 2022	Website PPID	LHP TA 2021 pada Kabupaten Kutai Timur	Tidak dapat ditindaklanjuti	Pemohon tidak melengkapi persyaratan Permintaan Informasi
46.	2 Oktober 2022	Website PPID	LHP DTT Kota Samarinda TA 2021 pada belanja insentif ASN dan Non ASN	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
47.	2 Oktober 2022	Website PPID	LHP TA 2021 pada LKPD Kota Samarinda	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
48.	14 Oktober 2022	Website PPID	LHP TA 2017 s.d 2021 pada LKPD Kota Balikpapan dan Kota Samarinda	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
49.	20 Oktober 2022	Website PPID	<p>1. Proyek Pembangunan Jembatan Aji Tulus-Jejangkat antara Pemda Kabupaten Kutai Barat Periode TA Jamak 2012-2015 dengan Kontrak Awal Rp341.010.475.000,00</p> <p>2. Proyek Pembangunan Proyek Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Sp. Ombau – Juaq Asa – Linggang Amer – Mencelew TA Jamak 2012-2015 dengan Kontrak Awal Rp460.590.287.000,00 (empat ratus enam puluh milyar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan Proyek Pembangunan Jembatan, Turap dan Box Culvert Ruas Jalan SP. Ombau -Juaq Asa - L. Amer – Mencelew TA Jamak 2013-2016 dengan kontrak awal senilai Rp183.263.060.000,00 (seratus delapan puluh tiga milyar dua ratus enam puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah).</p> <p>3. Proyek Pembangunan Dermaga Sendawar (Royoq) Tahun Jamak TA 2012-2015 dengan Kontrak Awal Rp57.441.420.000,00 (lima puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).</p> <p>4. Proyek Pembangunan Gedung Kristen Center Tahun Jamak TA 2012-2015 dengan Kontrak Awal Rp50.700.400.000,00 (lima puluh milyar tujuh ratus juta empat ratus ribu rupiah).</p>	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
50.	25 Oktober 2022	Datang Langsung	IHPD Tahun 2020 dan 2021	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>
51.	4 November 2022	Website PPID	Perda Kota Balikpapan no. 5 Tahun 2006 tentang RTRW Kota Balikpapan	Selesai	Mengirimkan link website
52.	15 Desember 2022	Website PPID	LHP Kota Samarinda TA 2019 dan LHP Kota Samarinda TA 2020	Selesai	Informasi diberikan dalam bentuk <i>Softcopy</i>

Permintaan informasi yang tidak dapat ditindaklanjuti merupakan informasi yang tidak dapat dijelaskan tujuan permintaan informasinya oleh pemohon.

2. PENGADUAN MASYARAKAT

a. Saluran Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat yang berasal dari publik eksternal BPK dapat disalurkan melalui beberapa saluran pengaduan yaitu website/e-ppid, surat/e-mail/telepon, ataupun datang langsung ke Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang beralamat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, M. Yamin No.19 Samarinda.

Selama periode Tahun 2022, analisis kuantitatif pengaduan masyarakat di BPK melalui website/e-ppid, surat/e-mail/telepon, ataupun datang langsung adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Persentase Saluran Pengaduan Masyarakat

No.	Saluran	Jumlah	Persentase
1	Website/e-ppid	1	20%
2	Surat/Email/Telepon	4	80%
3	Langsung	0	0%
4	Kotak Pengaduan	0	0%
	JUMLAH	5	100%

Selama periode Tahun 2022, saluran pengaduan yang masuk melalui saluran surat/e-mail/telepon sebanyak empat laporan, sedangkan melalui website/e-ppid sebanyak satu laporan, dan datang secara langsung atau melalui kotak pengaduan tidak ada.

b. Topik Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dapat dikategorikan ke dalam topik pengaduan yang terkait dengan pemeriksaan dan non pemeriksaan. Topik pengaduan terkait dengan pemeriksaan yaitu informasi permasalahan penyimpangan keuangan negara/daerah dan laporan hasil pemeriksaan. Sedangkan topik pengaduan non pemeriksaan yaitu kepegawaian/SDM, informasi BPK yang dipublikasikan, dan lain-lain.

Selama periode Tahun 2022, pengaduan masyarakat yang masuk diklasifikasikan berdasarkan topik pengaduan sebagai berikut.

Tabel 8. Persentase Topik Pengaduan Masyarakat

No	Topik	Jumlah	Persentase
	Pemeriksaan		
1	Permohonan Pemeriksaan	1	20%
2	Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	2	40%
3	Laporan Hasil Pemeriksaan	-	-
	Non Pemeriksaan		
4	Kepegawaian/SDM	-	-
5	Informasi BPK yang dipublikasikan	-	-
6	Lain-lain	2	40%
7	Sampah (<i>Trash</i>)	-	-
	JUMLAH	5	100%

Selama periode Tahun 2022 topik pengaduan masyarakat yang masuk yaitu informasi Permohonan Pemeriksaan sebanyak satu laporan, informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah sebanyak dua laporan dan informasi lain-lain sebanyak dua laporan.

c. Tanggapan Terhadap Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur akan ditanggapi dan diteruskan ke satker. Adapun analisis kuantitatif pengaduan masyarakat yang ditanggapi adalah sebagai berikut.

Tabel 9. Tanggapan Atas Pengaduan Masyarakat

No	Topik	Jumlah	Yang Ditanggapi oleh Subbag Humas dan TU Kalan	Yang Diteruskan ke Satker
	Pemeriksaan			
1	Permohonan Pemeriksaan	1	-	1
2	Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	2	-	2
3	Laporan Hasil Pemeriksaan	-	-	-
	Non Pemeriksaan			
4	Kepegawaian/SDM	-	-	-
5	Informasi BPK yang dipublikasikan	-	-	-

No	Topik	Jumlah	Yang Ditanggapi oleh Subbag Humas dan TU Kalan	Yang Diteruskan ke Satker
6	Lain-lain	2	-	2
7	Sampah (<i>Trash</i>)	-	-	-
	JUMLAH	5	-	5

Selama periode Tahun 2022, pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak lima laporan telah ditanggapi dan diteruskan ke satker terkait.

d. Tanggapan Terhadap Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur akan ditanggapi dan ditindaklanjuti. Selama periode Tahun 2022, tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sebagai berikut.

Tabel 10. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

No	Tanggal Pengaduan	Pengaduan	Satker Terkait	Media			Status
				Website	Surat/ Email/ Telepon	Langsung	
1	04 Februari 2022	Informasi tidak dibayarnya proyek pekerjaan Jalan Batu Klo ke arah Poros sejauh 2,8km (APBD Kabupaten Mahakam Ulu)	Subauditorat Kalimantan Timur II	-	1	-	Ditindaklanjuti
2	08 Februari 2022	Permohonan Pengembalian batas hak milik tanah kepada Pemerintah Kota Balikpapan	Subauditorat Kalimantan Timur I	-	1	-	Ditindaklanjuti
3	01 Maret 2022	Informasi adanya keluhan masyarakat dan permohonan pemeriksaan terhadap pekerjaan proyek rehabilitasi jembatan Desa Tanjung Limau	Subauditorat Kalimantan Timur I	-	1	-	Ditindaklanjuti
4	11 Oktober 2022	Informasi tidak berkembangnya dan kerugian yang dialami oleh perusda	Subauditorat Kalimantan Timur I	-	1	-	Ditindaklanjuti
5	08 November 2022	Ada ketidakadilan pada Pokja Pemilihan paket pekerjaan Rehab Gedung Kantor Basuki Rahmat.	Subauditorat Kalimantan Timur I	1	-	-	Ditindaklanjuti
JUMLAH				1	4	-	

Selama periode Tahun 2022, pengaduan masyarakat yang masuk telah ditanggapi dan ditindaklanjuti serta diteruskan ke satker terkait.

E. KOMPLAIN ATAS INFORMASI

Pada Tahun 2022 tidak ada komplain atas informasi yang masuk melalui saluran website, surat/email/telepon, ataupun langsung.

F. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama periode Tahun 2022 tidak terdapat kendala baik internal maupun eksternal.

G. RENCANA TINDAK LANJUT

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik sesuai maklumat yang telah kami buat untuk masyarakat lebih dekat, respon cepat mendapatkan informasi dan biaya hemat. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Menyusun database pengaduan masyarakat;
2. Melakukan peningkatan kompetensi petugas PIK secara berkelanjutan;
3. Meningkatkan komunikasi petugas PIK dan satuan kerja terkait tindak lanjut atas permintaan informasi dan pengaduan masyarakat.

H. BERITA AKTUAL

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan penyajian berita aktual selama periode Tahun 2022 berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara/daerah. Berita tersebut dapat diakses melalui laman berita pada website BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur maupun kliping media massa yang dapat diakses bagi seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada *folder sharing* BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Selama periode Tahun 2022, analisis kuantitatif berita aktual yang menarik perhatian adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Berita Aktual Kaltim

No	Isi Berita	Sumber Berita	Tanggal Berita
1	Kepala Desa Suko Mulyo Kecamatan Sepaku Penajam Paser Utara melaporkan adanya aktivitas tambang ilegal yang semakin meluas kepada Presiden	Kaltim Post	7 September 2022
2	Perombakan lantai halaman kantor Bupati Kabupaten Paser akan dirombak sampai dengan akhir tahun dengan anggaran Rp 4,7 miliar	Kaltim Post	16 September 2022
3	Pemerintah Kabupaten Paser menyediakan anggaran bantuan perlindungan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM sebesar Rp 20 miliar	Kaltim Post	16 September 2022
4	Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sudah menggelontorkan anggaran puluhan miliar untuk pembangunan peningkatan jalan semenisasi dari Simpang Tokong - Simpang GBU - Besiq tahun 2022 dengan total biaya Rp 37 miliar	Koran Kaltim	20 September 2022
5	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menganggarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 40 miliar pada APBD Kaltim tahun 2022	Koran Kaltim	5 Oktober 2022
6	10 Partai Politik terima dana bantuan sebesar Rp 1,27 Miliar Tahun 2022	Tribun Kaltim	5 Oktober 2022

No	Isi Berita	Sumber Berita	Tanggal Berita
7	Dana Desa sudah tersalur 78 persen atau Rp594,72 Miliar yang dialokasikan untuk 841 desa yang tersebar di tujuh Kabupaten di Kalimantan Timur	Koran Kaltim	10 Oktober 2022
8	Penyaluran Dana Desa di Kaltim Capai 91,86 Persen dari total Dana Desa tahun 2022 yang mencapai Rp710,26 miliar setelah dilakukan relokasi anggaran	Koran Kaltim	23 November 2022
9	Pemkot Bontang menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi BBM untuk 7.510 warga yang tersebar di 15 kelurahan se-Kota Bontang.	Koran Kaltim	23 November 2022
10	BPKAD Kota Balikpapan menghentikan sementara proses pencairan anggaran pekerjaan terhadap proyek DAS Ampal dikarenakan minim progress yang hanya mencapai 1 persen	Koran Kaltim	23 November 2022
11	Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara menyerahkan uang sebesar Rp1,4 miliar kepada Pemerintah Kabupaten yang merupakan uang hasil temuan atas 52 kegiatan pembangunan oleh pihak ketiga TA 2017.	Koran Kaltim	9 Desember 2022
12	Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan belum menyelesaikan utang pembangunan rumah jabatan Bupati PPU kepada pelaksana kegiatan atau kontraktor.	Koran Kaltim	21 Desember 2022
13	Penanganan korupsi di Benua Etam sepanjang 2022 diakhiri dengan penyelamatan kerugian negara mencapai Rp7 miliar.	Kaltim Post	31 Desember 2022
Jumlah			13

Selama periode Tahun 2022, berita aktual bersumber dari media massa yang menarik perhatian sebanyak 13 (tiga belas) berita.

I. KESIMPULAN

Selama periode Tahun 2022, terdapat 52 permintaan informasi yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Permintaan informasi yang masuk tersebut dengan topik pemeriksaan yaitu permintaan laporan hasil pemeriksaan sebanyak 49 permintaan dan informasi lain-lain sebanyak tiga permintaan sedangkan informasi serta merta, setiap saat maupun dikecualikan tidak ada.

Adapun laporan pengaduan yang masuk selama periode Tahun 2022 sebanyak lima laporan yaitu pada jenis permohonan pemeriksaan sebanyak satu laporan, informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah sebanyak dua laporan serta lain-lain sebanyak dua laporan.

Berdasarkan pemberitaan di media massa selama periode Tahun 2022, terdapat 13 (tiga belas) berita aktual yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara/daerah yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur.

Demikian Laporan Pelayanan Informasi dan Komunikasi ini dibuat dengan harapan hasil laporan ini dapat menjadi masukan dan informasi bagi siapa yang berkepentingan.

Samarinda, 14 Januari 2023

Mengetahui,

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
BPK Perwakilan Kalimantan Timur

Agus Priyono

NIP. 197204211998031003



Indra Priyo Suseno

NIP. 198012042007081001